KABUPATEN BADUNG

RENCANA KERJA

DINAS PERIKANAN

KABUPATEN BADUNG

TAHUN 2025

DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2024

BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR 104/051/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA
DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2025

BUPATI BADUNG,

Menimbang :

a. bahwa rencana kerja merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksdud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Badung Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5081);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021–2026;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
16. Peraturan Bupati Badung Nomor 45 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Bupati Badung Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Badung Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Badung Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Bab II. Hasil Evaluasi Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun lalu

Bab III. Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan

Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perikanan

Bab V. Penutup

KETIGA : Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Badung bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 2 Agustus 2024

BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA

Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
2. Kepala Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG
NOMOR 104/051/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA
DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2025

DAFTAR ISI

Halaman

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG NOMOR 104/051/HK/2024 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2025

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL ii

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BADUNG TAHUN LALU 6

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Badung Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Badung 7

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Badung 13

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Badung 13

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN BADUNG **16**

3.1 Tujuan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Badung 16

3.2 Sasaran Renja Dinas Perikanan Kabupaten Badung 16

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN BADUNG **18**

Program dan Kegiatan 18

BAB V. PENUTUP 20

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Badung dan Pencapaian Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Badung s/d Tahun 2024	9
Tabel 3.1	Tujuan, Indikator Kinerja Tujuan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Badung Tahun 2025	16
Tabel 3.2	Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2025 ...	17
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Badung Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026	20

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Perikanan Kabupaten Badung merupakan salah satu dinas yang ada di Kabupaten Badung yang menangani urusan kelautan dan perikanan. Kabupaten Badung memiliki potensi sumberdaya perikanan yang belum dimanfaatkan secara optimal. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya perikanan agar dapat meningkatkan perekonomian, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan adanya terobosan-terobosan melalui pelaksanaan program-program pembangunan daerah. Dalam mendukung pelaksanaan program-program pembangunan tersebut, Dinas Perikanan Kabupaten Badung harus mampu menampung kegiatan-kegiatan sebagai perwujudan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diembannya.

Tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Perikanan Kabupaten Badung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, adalah melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang Perikanan, melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Bupati kepadanya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menyatakan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Badung adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan.
3. Pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan.
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perikanan.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi di bidang perikanan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu disusun sebuah perencanan pembangunan perikanan yang memuat tentang rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam bentuk suatu Rencana Kerja (Renja). Rencana Kerja ini disusun dengan mengakomodir berbagai usulan pembangunan yang disampaikan melalui proses musrenbang baik

musrenbang desa maupun musrenbang kecamatan. Selain itu juga mengakomodir rencana-rencana program dan kegiatan yang merupakan kebijakan di SKPD.

Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Badung adalah sebagai berikut: "***Melanjutkan Kebahagiaan Masyarakat Badung Melalui Pembangunan Badung Berlandaskan Tri Hita Karana***". Untuk mewujudkan visi yang ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Badung sudah menetapkan misi. Sedangkan pembangunan Perikanan yang berkenaan dengan **Misi** Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Badung adalah sebagai berikut : ***"Memperkuat Sinergi Pariwisata dan Pertanian yang Berorientasi kepada Agroindustri dan Pelestarian Sumber Daya Alam".***

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut di atas setiap tahun maka disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Badung Tahun 2025 yang memuat rencana program dan kegiatan dinas serta rencana pendanaannya pada tahun 2025. Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun 2025 adalah penjabaran tahun keempat dari Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Badung Tahun 2021 -2026.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5081);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasill Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
16. Peraturan Bupati Badung Nomor 45 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Bupati Badung Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Badung disusun dengan maksud sebagai berikut :

a. menyediakan dokumen Rencana Kerja pembangunan pada Dinas Perikanan Kabupaten Badung dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahun 2025
b. sebagai salah satu bahan untuk penyusunan dan pembahasan untuk penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disusun oleh Bappeda Kabupaten Badung.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

a. Tersusunnya perencanaan program dan kegiatan perikanan sesuai dengan potensi yang ada serta dengan mengakomodir hasil musrenbang di setiap kecamatan.
b. Untuk memberikan arah, acuan dan indikator capaian yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pembangunan perikanan.
c. Sebagai pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA Dinas Perikanan Kabupaten Badung.

4.1 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BADUNG TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Badung Tahun lalu dan capaian sasaran Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Badung

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Badung

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Badung.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN BADUNG

3.1 Tujuan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Badung.

3.2 Sasaran Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Badung.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN BADUNG

Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BADUNG TAHUN LALU

Pada Tahun 2023, pencapaian target kinerja program dan kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Badung dari total belanja yang telah ditetapkan dalam Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pokok Tahun 2023 sebesar Rp. 19.685.304.233,- dengan capaian realisasi pada Akhir Tahun 2023 sebesar Rp. 17.116.777.826,- dengan Prosentase 86,95%. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan sebagai berikut :
   a. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target 21 jenis dokumen dan terealisasi seluruhnya.
   b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, target 12 bulan terealisasi 12 bulan.
   c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, target 7 jenis telah terealisasi seluruhnya.
   d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, seluruhnya terealisasi 6 unit.
   e. Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, target 12 bulan terealisasi 12 bulan.
   f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, target 80 unit terealisasinya seluruhnya.
2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan kegiatan sebagai berikut :
   a. Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota, target 12 bulan terealisasi seluruhnya.
   b. Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan target 2 kegiatan dan terealisasi 2 kegiatan.
   c. Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), target 2 unit dengan realisasi 2 unit.

3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan kegiatan sebagai berikut :
   a. Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil, target 63 kelompok dan terealisasi 63 kelompok.
   b. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, target 12 bulan terealisasi seluruhnya.
4. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dengan kegiatan sebagai berikut :
   a. Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota, dengan target 1 kawasan dan terealisasi 1 kawasan.
5. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan kegiatan sebagai berikut :
   a. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan target 1 kegiatan dan terealisasi seluruhnya.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perikanan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Badung

Dinas Perikanan Kabupaten Badung pada tahun 2024 telah melaksanakan 5 program yang terurai ke dalam 13 kegiatan dan 33 sub kegiatan yang dibiayai oleh dana APBD Kabupaten Badung..

Dari aspek keuangan, kegiatan-kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Badung dilaksanakan berdasarkan Anggaran Induk Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar Rp. 19.596.494.862,00 yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp. 19.488.089.154,00 dan belanja modal sebesar Rp. 108.405.708,00 Sampai akhir tri wulan II tahun 2024 anggaran belanja operasi sudah terealisasi sebesar Rp. 7.464.369.193,00 (38,30 %) dan anggaran belanja modal sudah terealisasi sebesar Rp. 101.700.000,00 (93,81 %).

Adapun pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan perikanan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu sebesar Rp. 15.273.389.408,00 terdiri dari 6 kegiatan dan 18 sub kegiatan.
b. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan pagu sebesar Rp. 2.203.303.223,00 terdiri dari 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan.

c. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan pagu sebesar Rp. 1.250.468.483,00 terdiri dari 2 kegiatan dan 6 sub kegiatan.
d. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dengan pagu sebesar Rp. 207.644.763,00 terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan.
e. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan pagu sebesar Rp. 661.688.985,00 terdiri dari 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan.

Hasil - pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan perikanan sampai dengan tri wulan II adalah sebagai berikut :

a. Jumlah produksi perikanan di Kabupaten Badung berasal dari produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Jumlah produksi perikanan tangkap sebesar 3.481,37 ton dari target yang ditetapkan sebesar 8.146 ton atau mencapai besaran 42,74 %. Perikanan tangkap Kabupaten Badung didukung oleh 4 kecamatan yaitu, Kuta Utara, Kuta, Kuta Selatan dan Mengwi. Sedangkan jumlah produksi perikanan dari sektor perikanan budidaya sebesar 268,36 dari target yang ditetapkan sebesar 663 ton atau mencapai 40,48 %. Perikanan budidaya di Kabupaten Badung terdiri dari budidaya di kolam air tenang, saluran irigasi dan minapadi yang didukung oleh 4 kecamatan yaitu Kuta Utara, Mengwi, Abiansemal dan Petang. Capaian produksi perikanan ini tidak terlepas dari bantuan yang diserahkan pada masyarakat berupa pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan perikanan budidaya, serta adanya pembinaan terhadap pelaku usaha perikanan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Badung.
b. Produksi benih ikan di BBI Kabupaten Badung sebesar 1.495.000 ekor dari target produksi tahun sebesar 2.150.000 ekor atau mencapai 69,53 %. Sesuai dengan Peraturan Bupati Badung nomor 13 Tahun 2015, melalui program yang disebut dengan SIBETIS MULUS (DISTRIBUSI BENIH GRATIS MENUJU KELUARGA SEJAHTERA) di Kabupaten Badung benih ikan diberikan secara gratis.
c. Tingkat Konsumsi Ikan di Kabupaten Badung tahun 2024 sebesar 35,85 kg/kapita/tahun.

Apabila dikaitkan dengan target capaian sasaran sebagaimana yang tercantum dalam Renstra, maka realisasi tingkat capaian sasaran Renstra pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan pencanpaian Renstra PD s/d Tahun 2024

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Th n-3	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Th n-3			Target Program / Kegiatan (Renja PD) Tahun Berjalan/ n-1 (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
								Target Renja PD Tahun n-2	Realisasi Renja PD Tahun n-2	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1) (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2024)
							2022	2023	2023				(%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=10/4
3				**Urusan Pilihan**									
	25			**Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan Dinas Perikanan**									
		01		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Tingkat ketersediaan prasarana administrasi perkantoran untuk pelaksanaan tugas**						**12 bulan**	**6 bulan**	
			2.01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah jenis dokumen kegiatan kegiatan**	**22 jenis**					**21 jenis**	**12 jenis**	**57%**
				01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	12 Jenis	12 Jenis	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	6 Dokumen	50%
				06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah pengelola keuangan yang berkinerja	16 orang	0	0 orang	0 orang	#DIV/0!	0 orang	0 orang	#DIV/0!
				07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 jenis	9 Dokumen	9 Laporan	9 Laporan	100%	9 Laporan	6 Laporan	67%
			2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah pegawai negeri sipil yang terbayarkan gaji dan tunjangannya**						**12 bulan**	**6 bulan**	**50%**
				01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	54 orang	55 orang	55 orang	54 orang	98%	648 orang/bulan	324 orang/bulan	50%
			2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya kebutuhan administrasi umum perangkat daerah**						**7 jenis**	**4 jenis**	**57%**
				01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 bangunan/kantor	5 bangunan/kantor	5 bangunan/kantor	5 bangunan/kantor	100%	1 paket	1 paket	100%
				02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	1 paket	1 paket	100%
				03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	4 bangunan/kantor	4 bangunan/kantor	4 kantor	4 kantor	100%	1 paket	1 paket	100%
				04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	1 paket	1 paket	100%

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Th n-3	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Th n-3		Target Program / Kegiatan (Renja PD) Tahun Berjalan/ n-1 (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
							Target Renja PD Tahun n-2	Realisasi Renja PD Tahun n-2	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1) (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2024)
						2022	2023	2023			(%)
1			2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=10/4
		05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	1 paket	1 paket	100%
		06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1940 exp/bulan	408 exp/bulan	388 exp/bulan	388 exp/bulan	100%	5 dokumen	5 dokumen	100%
		08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu					#DIV/0!	1 Laporan	1 Laporan	100%
	2.07		**Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terealisasi**						**6 Unit**	**6 Unit**	
		06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan						6 unit	6 unit	100%
	2.08		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya kebutuhan jasa penunjang perangkat daerah**						**12 bulan**	**6 bulan**	**50%**
		01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1265 buah	500 buah	253 buah	253 buah	100%	12 laporan	6 laporan	50%
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 laporan	6 laporan	50%
		04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan	9 orang	9 orang	9 orang	8 orang	89%	12 laporan	6 laporan	50%
	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya kebutuhan pemeliharaan aset milik daerah**						**80 unit**	**50 unit**	**63%**
		01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 kendaraan	1 kendaraan	1 kendaraan	1 kendaraan	100%	1 unit	1 unit	100%
		02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinan	25 kendaraan	25 kendaraan	25 kendaraan	25 kendaraan	100%	25 unit	25 unit	100%
		06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	50 unit	50 unit	50 unit	50 unit	100%	50 unit	10 unit	20%
		09	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 bangunan/kantor	4 bangunan/kantor	4 kantor	4 kantor	100%	4 unit	0 unit	0%
	03		**Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**	**Jumlah produksi perikanan tangkap**						**7986 ton**	**4313,00 ton**	
	2.01		**Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Bulan keterkelolanya penangkapan ikan**						**12 bulan**	**6 bulan**	**50%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Th n-3	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Th n-3			Target Program / Kegiatan (Renja PD) Tahun Berjalan/ n-1 (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun n-2	Realisasi Renja PD Tahun n-2	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1) (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2024)
				2022	2023	2023				(%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=10/4
	01 Penyediaan Data dan Informasi Sumberdaya Ikan	Jumlah data dan informasi sumber daya ikan di perairan darat dalam satu Kabupaten/Kota yang tersedia						3 dokumen	3 dokumen	**100%**
	03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang terjamin dan tersedia	2 paket	2 paket	11 unit	11 unit	100%	16 unit	0 unit	0%
2.02	**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil di Kabupaten Bandung**						**2 Kegiatan**	**2 Kegiatan**	**100%**
	01 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah nelayan kecil yang meningkat kapasitasnya	120 orang	30 orang	902 orang	902 orang	100%	60 orang	0 orang	0%
	02 Pelaksanaan Fasillitasi Pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil	Jumlah kelompok nelayan kecil yang difasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagannya						56 kelompok	56 kelompok	100%
2.03	**Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**	**Jumlah TPI yang memberikan layanan**						**2 unit**	**2 unit**	**100%**
	02 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah layanan dalam rangka penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)						2 layanan	2 layanan	100%
04	**Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**	**Jumlah produksi perikanan budidaya**						**650 ton**	**266 ton**	**41%**
2.02	**Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil**	**Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang meningkat kelas kemampuannya**						**63 kelompok**	**63 kelompok**	**100%**
	01 Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudi daya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas						33 kelompok	33 kelompok	100%
	02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudi daya ikan kecil	Jumlah kelompok pembudi daya ikan kecil yang mengikuti pembentukan dan pengembangan kelembagaan						29 kelompok	29 kelompok	100%
	04 Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi Serta Penyelenggaraan Dan Pelatihan	Jumlah kelompok usaha yang memperoleh pen-dampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan						2 kelompok	2 kelompok	100%
2.04	**Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**Jumlah bulan keterkelolanya pembudidaya ikan**						**12 bulan**	**6 bulan**	**50%**
	01 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota						2 dokumen	2 dokumen	100%

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Th n-3	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Th n-3		Target Program / Kegiatan (Renja PD) Tahun Berjalan/ n-1 (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
							Target Renja PD Tahun n-2	Realisasi Renja PD Tahun n-2	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1) (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2024)
						2022	2023	2023			(%)
1			2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=10/4
			03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pembudidaya ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota		31 petak kolam	3 unit BBI	3 unit BBI	100%	2 unit	2 unit	100%
			04 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah hasil ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota yang teruji melalui pengelolaan kesehatan ikan		20 sampel	20 sampel	20 sampel	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
			05 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudiaya yang memperoleh pembinaan dan pemantauan Pembudidayaan Ikan di darat			50 orang	50 orang	100%	50 orang	0 orang	0%
	05		**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**1 kawasan**	**1 kawasan**	
		2.01	**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kawasan perairan yang diawasi kegiatan usahanya**						**1 kawasan**	**1 kawasan**	
			01 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pengawasan sumber daya perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota						3 dokumen	3 dokumen	100%
	06		**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Produksi Olahan Hasil Perikanan**						**6742 ton**	**3316 ton**	
		2.03	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Bahan Baku yang tersedia dan terserap untuk industri Pengolahan Ikan**			**6610 ton**	**6610 ton**	**100%**	**1 kegiatan**	**1 kegiatan**	100%
			01 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			17211 ton	17211 ton	100%	19436 ton	8900 ton	46%

Mengetahui,
Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Badung,

I Nyoman Suardana, S.Sos.,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19721010 199302 1 002

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Badung

Sesuai dengan undang-undang No. 25 tahun 2009, salah satu fungsi pemerintah yang utama adalah menyelenggarakan pelayanan umum sebagai wujud dari tugas umum pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Birokrasi merupakan instrumen pemerintah untuk mewujudkan pelayanan publik yang efisien, efektif, berkeadilan, transparan dan akuntabel. Hal ini berarti bahwa untuk mampu melaksanakan fungsi pemerintah dengan baik maka organisasi birokrasi harus profesional, tanggap, aspiratif terhadap berbagai tuntutan masyarakat yang dilayani. Seiring dengan hal tersebut pembinaan aparatur negara dilakukan secara terus menerus, agar dapat menjadi alat yang efisien dan efektif, bersih dan berwibawa, sehingga mampu menjalankan tugas-tugas umum pemerintah maupun untuk menggerakkan pembangunan secara lancar dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian terhadap masyarakat. Pada tahun 2024 Dinas Perikanan Kabupaten melaksanakan 5 program yang terurai kedalam 13 kegiatan dan 33 sub kegiatan yang dibiayai oleh dana APBD Kabupaten Badung.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Badung

Tantangan yang dihadapi Dinas Perikanan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya meliputi permasalahan – permasalahan sebagai berikut :

a. Masih terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan profesionalisme teknis di bidang perikanan, secara umum tingkat profesionalisme/kualitas SDM perikanan masih kurang, sehingga pelu diadakan peningkatan kompetensi dengan mengadakan pelatihan / Diklat Teknis.

b. Belum sempurnanya basis data dan informasi perikanan
   Data serta informasi tentang perikanan masih terbatas dan belum tertata dengan baik dalam suatu sistem jaringan, sehingga sulit mengaksesnya untuk menetapkan suatu kebijakan. Selain itu tingkat akurasi dan validasinya belum optimal. Dalam rangka menunjang perencanaan pembangunan perikanan, ketersediaan data yang akurat dan tidak kedaluarsa menjadi salah satu faktor penting. Statistik Perikanan yang ada saat ini dirasakan masih belum menyajikan data perikanan yang cukup akurat, lengkap dan detail. Masih terbatasnya data dan informasi mengenai

potensi perikanan serta sosial ekonomi untuk menunjang pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan bagi pembudidaya ikan, nelayan dan masyarakat pesisir lainnya.

c. Terbatasnya permodalan

Belum optimalnya sosialisasi terkait kebijakan pemberian kredit murah dan lunak oleh lembaga perbankan untuk mendukung usaha budidaya perikanan, perikanan tangkap ataupun industri pengolahan sehingga produk yang dihasilkan tidak bisa bersaing dengan produk luar baik secara kualitas, kuantitas maupun kontinyuitasnya.

d. Daya saing produk hasil perikanan

Pemasaran produk perikanan di pasar dalam negeri maupun ekspor, sebagian besar masih ditentukan oleh para pembeli/konsumen (*buyer market*). Hal ini mengakibatkan harga jual produk perikanan seringkali kurang menguntungkan pihak produsen (nelayan dan pembudidya ikan). Ada dua faktor utama yang membuat pemasaran produk perikanan masih lemah, yaitu pertama, masih lemahnya *market intelligence* yang meliputi penguasaan informasi tentang pesaing, segmen pasar dan selera (*preference*) para konsumen. Kedua, belum memadainya sarana dan prasarana system transportasi dan komunikasi untuk mendukung distribusi atau penyampaian (*delivery*) produk perikanan dari produsen ke konsumen secara tepat waktu.

Selain permasalahan tersebut ada beberapa permasalahan yang dihadapi pada tahun 2024 yaitu :

a. Harga pakan ikan mengalami fluktuasi cukup tinggi serta mutu dan ketersediaan benih masih terbatas, adanya cuaca ekstrim akibat kemarau panjang sehingga debit air di perairan umum mengalami penurunan, sehingga menghambat pengembangan budidaya perikanan air tawar.
b. Kemampuan teknis petugas, nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan di bidang penguasaan dan penerapan teknologi serta dalam mengakses teknologi di bidang perikanan dan kelautan belum optimal.
c. Terjadinya sampah kiriman pada waktu musim angin barat sehingga menyebabkan penurunan kualitas sumber daya air, berpotensi adanya kematian ikan/red tide. Disamping itu mengakibatkan pencemaran wilayah pesisir/pantai.
d. Masih terbatasnya kemampuan pelaku utama perikanan dalam hal pemasaran produk-produk hasil perikanan. Hal ini terlihat dari masih

lemahnya market intelligence yang meliputi penguasaan informasi tentang pesaing, segmen pasar dan selera (preference) para konsumen.

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perikanan kabupaten Badung baik dari sisi internal maupun eksternal, akan berdampak terhadap terhambatnya pencapaian produksi perikanan baik dari sisi produksi perikanan maupun hasil pengolahan dan pemasaran komoditi perikanan.

Beberapa hal yang dapat dilaksanakan untuk dapat memperkecil dampak isu-isu dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Badung yaitu :

a. Mengembangkan data dan informasi perikanan melalui sistem informasi geografis
b. Mencari berbagai alternatif pakan ikan yang dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas benih ikan untuk mendorong peningkatan produksi usaha pembenihan rakyat (UPR) dan Balai Benih Ikan (BBI) didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.
c. Secara kontinyu melaksanakan bintek, pelatihan, magang, demplot dan sekolah lapang bagi petugas, nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan, serta kelompok pemasar hasil perikanan.
d. Membuka akses pasar terhadap produk hasil perikanan melalui system pemasaran yang komprehensif dengan melibatkan unit-unit pemasaran yang ada di masyarakat.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN BADUNG

3.1. Tujuan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Badung

Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang dan mengarahkan perumusan sasaran serta cara mencapai tujuan untuk jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan juga merupakan penjabaran dari misi yang telah ditetapkan. Tujuan pembangunan yang diampu oleh Dinas Perikanan dalam Renstra Tahun 2021 – 2026 adalah "**Terwujudnya Pertumbuhan Sektor Pertanian Sinergi dengan Sektor Pariwisata Berkelanjutan**".

Sedangkan untuk tujuan pada Dinas Perikanan Kabupaten Badung sesuai review ke-2 Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2021 adalah **"Meningkatnya ketersediaan pangan dari sektor perikanan dengan memanfaatkan potensi sumber daya perikanan secara lestari dan berkelanjutan"**. Tujuan jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Dinas Perikanan dalam Renstra Dinas Perikanan Tahun 2021 – 2026 melalui indikator sebagai berikut :

Tabel 3.1. Tujuan , Indikator Kinerja, Target Kinerja Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Badung Tahun 2025

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target Tahun 2025	Target Kinerja Tujuan Akhir Renstra
Meningkatnya ketersediaan pangan dari sektor perikanan dengan memanfaatkan potensi sumber daya perikanan secara lestari dan berkelanjutan	- Tingkat konsumsi ikan - Prosentase Ketersediaan Pangan dari Sektor Perikanan	38,05 kg/kapita/tahun 68,16	39,58 kg/kapita/tahun

3.2. Sasaran Renja Dinas Perikanan Kabupaten Badung

Sasaran pembangunan perikanan yang tercantum dalam Renstra Dinas Perikanan Tahun 2021 – 2026 adalah ***"Meningkatnya Kuantitas, Kualitas dan Kontinyuitas Produk Pertanian"***. Dan untuk sasaran Dinas Perikanan sesuai Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Badung Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningatnya produksi perikanan
2. Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
3. Meningkatnya kelestarian sumberdaya perikanan

Sasaran Dinas Perikanan Tahun 2025 diwujudkan melalui indikator dan target pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.2 Sasaran, Indikator sasaran dan Target Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Badung Tahun 2025

Sasaran	**Indikator Sasaran**	**Target Indikator Sasaran Tahun 2025**
Meningatnya produksi perikanan	Jumlah produksi perikanan (Ton)	8.985
Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Jumlah produksi olahan hasil perikanan (Ton))	7.014
	Jumlah Produksi pemasaran hasil perikanan (Ton)	10.346
Meningkatnya kelestarian sumberdaya perikanan	Jumlah pengembangan kawasan perairan yang lestari	1 Kawasan

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN BADUNG

Kabupaten Badung memiliki potensi sumberdaya perikanan cukup besar, namun belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Dalam upaya optimalisasi pemanfaatan sumberdaya perikanan agar bermanfaat untuk meningkatkan perekonomian, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat khususnya nelayan, pembudidaya ikan serta pengolah dan pemasar hasil-hasil perikanan, maka pemerintah melalui Dinas Perikanan Kabupaten Badung melaksanakan berbagai program dan kegiatan di bidang perikanan. Program-program yang dilaksanakan terdiri dari program dan kegiatan yang bersifat *Top Down* yaitu program yang merupakan kebijakan pemerintah, dan program serta kegiatan yang bersifat *bottom up* yaitu program dan kegiatan yang disusun berdasarkan usulan dari bawah diantaranya adalah program dan kegiatan yang disusun dengan mengakomodir hasil Musrenbang Kecamatan yang merupakan rangkuman dari usulan masyarakat di desa-desa maupun di kelurahan.

Adapun Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Badung Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan sebagai berikut :
   a. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu sebesar Rp. 15.588.568,-
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan pagu sebesar Rp. 13.813.800.175,-
   c. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan pagu sebesar Rp. 587.721.453.-
   d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan pagu sebesar Rp. 972.302.445,-
   e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan pagu sebesar Rp. 358.171.496,-
   f. Pemeliharaan Barang Miik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan pagu sebesar Rp. 758.534.714,-
2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan kegiatan sebagai berikut :
   a. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dengan pagu sebesar Rp. 772.220.795,-

b. Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu sebesar Rp. 463.469.480,-

3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan kegiatan sebagai berikut :
   a. Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil dengan pagu sebesar Rp. 578.361.437,-
   b. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan dengan pagu sebesar Rp. 15.122.857.116,-
4. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
   a. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota dengan pagu sebesar Rp. 80.068.112,-
5. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan kegiatan sebagai berikut :
   a. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil dengan pagu sebesar Rp. 100.431.674,-
   b. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil dengan pagu sebesar Rp. 135.735.231,-
   c. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu sebesar Rp. 371.838.729,-

Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Badung Tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026 berikut dapat dilihat pada tabel 4.1.

TABEL 4.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERIKANAN TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

NAMA PD : DINAS PERIKANAN

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
						Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif	Sumber dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(10)
				DINAS PERIKANAN								
25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				34.131.071.425,00	PAD	Sesuai Analisa kebutuhan		18.349.427.218,12
25	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu**	**Kab Badung**	**12 bulan**	**16.506.088.851,00**	**PAD**	**Sesuai Analisa kebutuhan**	**12 bulan**	**13.764.271.635,20**
25	01	2.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun tepat waktu	Kab Badung	22 jenis	15.558.568,00	PAD	Sesuai Analisa kebutuhan	22 jenis	242.362.394,40
25	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Kab Badung	12 Dokumen	9.853.293,00	PAD	Sesuai Analisa kebutuhan	12 Dokumen	16.236.778,80
25	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah pengelola keuangan program kegiatan yang berkinerja	Kab Badung	16 orang	-		Sesuai Analisa kebutuhan	16 orang	215.197.233,60
25	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Badung	9 Laporan	5.705.275,00	PAD	Sesuai Analisa kebutuhan	9 Laporan	10.928.382,00
25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	Kab Badung	12 bulan	13.813.800.175,00	PAD	Sesuai Analisa kebutuhan	12 bulan	11.650.140.861,20
25	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Badung	49 orang/bln	13.813.800.175,00	PAD	Sesuai Analisa kebutuhan	648 orang/bln	11.650.140.861,20
25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis pelayanan administrasi umum tepat waktu	Kab Badung	7 Jenis	587.721.453,00	PAD	Sesuai Analisa kebutuhan	7 Jenis	572.244.440,40
25	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kab Badung	4 Paket	27.282.912,00	PAD	Sesuai Analisa kebutuhan	1 Paket	8.528.916,00
25	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perleng-kapan Kantor yang Disediakan	Kab Badung	1 Paket	36.292.005,00	PAD	Sesuai Analisa kebutuhan	3 Paket	143.236.819,20

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif	Sumber dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(10)
25 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab Badung	1 Paket	4.196.799,00	PAD	Sesuai Analisa kebutuhan	1 Paket	3.377.270,40
25 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik Kantor yang Disediakan	Kab Badung	1 Paket	371.736.585,00	PAD	Sesuai Analisa kebutuhan	3 Paket	275.990.056,80
25 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab Badung	1 Paket	10.377.900,00	PAD	Sesuai Analisa kebutuhan	1 Paket	25.912.338,00
25 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan yang Disediakan	Kab Badung	3 Dokumen	34.298.400,00	PAD	Sesuai Analisa kebutuhan	5 Dokumen	47.823.600,00
25 01 2.06 08	Fasilisitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab Badung	12 Laporan	4.902.852,00			Laporan	-
25 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Badung	12 Laporan	98.634.000,00	PAD	Sesuai Analisa kebutuhan	3 Laporan	67.375.440,00
25 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang direalisasikan dengan baik	Kab Badung	12 Bulan	972.302.445,00				-
25 01 2.07 01	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab Badung	8 Unit	460.656.000,00				-
25 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab Badung	1 Unit	511.646.445,00				-
25 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pelayanan jasa penunjang pemerintah daerah sesuai kebutuhan	Kab Badung	12 Bulan	358.171.496,00	PAD	Sesuai Analisa kebutuhan	12 Bulan	522.827.851,20
25 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab Badung	12 Laporan	4.639.800,00	PAD	Sesuai Analisa kebutuhan	12 Laporan	3.576.012,00
25 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab Badung	12 Laporan	35.224.400,00	PAD	Sesuai Analisa kebutuhan	12 Laporan	55.370.239,20
25 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	Kab Badung	12 Laporan	318.307.296,00	PAD	Sesuai Analisa kebutuhan	12 Laporan	463.881.600,00
25 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara dengan baik	Kab Badung	80 Unit	758.534.714,00			80 Unit	776.696.088,00

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
						Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif	Sumber dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(10)
25	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab Badung	1 Unit	38.354.772,00	PAD	Sesuai Analisa kebutuhan	1 Unit	144.175.200,00
25	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab Badung	25 Unit	410.313.352,00	PAD	Sesuai Analisa kebutuhan	25 Unit	580.581.528,00
25	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab Badung	35 Unit	41.600.000,00	PAD	Sesuai Analisa kebutuhan	35 Unit	46.569.600,00
25	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab Badung	4 Unit	268.266.590,00	PAD	Sesuai Analisa kebutuhan	4 Unit	5.369.760,00
25	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Produksi Perikanan Tangkap**	**Kab Badung**		**1.235.690.275,00**	**PAD**	**Sesuai Analisa kebutuhan**		**2.863.130.656,80**
25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bulan Keterkelolanya Penangkapan Ikan	Kab Badung	12 Bulan	772.220.795,00	PAD	Sesuai Analisa kebutuhan	12 Bulan	2.497.026.375,97
25	03	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kab Badung	2 Dokumen	0,00	PAD	Sesuai Analisa kebutuhan	2 Dokumen	363.577.615,93
25	03	2.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah prasarana perikanan tangkap yang dibangun untuk kelompok nelayan	Kab Badung	2 paket	772.220.795,00	PAD	Sesuai Analisa kebutuhan	2 paket	1.760.000.000,00
25	03	2.01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Kab Badung	0 Unit	0,00	PAD	Sesuai Analisa kebutuhan	6 Unit	373.448.760,04
25	03	2,02		Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prosentase pemberdayaan nelayan kecil	Kab Badung	100%	463.469.480,00	PAD	Sesuai Analisa kebutuhan	100%	352.070.476,37
25	03	2,02	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Kab Badung	30 Orang	454.209.986,00	PAD	Sesuai Analisa kebutuhan	30 Orang	324.853.000,00
25	03	2,02	02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang difasilitasi Pembentukan dan	Kab Badung	56 Kelompok	9.259.494,00	PAD	Sesuai Analisa kebutuhan	56 Kelompok	27.217.476,37

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
						Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif	Sumber dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(10)
				Nelayan Kecil	Pengembangan Kelembagaannya							
25	03	2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah TPI yang memberikan layanan	Kab Badung	2 Unit	-	PAD	Sesuai Analisa kebutuhan	2 Unit	14.033.804,46
25	03	2 03	02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kab Badung	2 Layanan	-	PAD	Sesuai Analisa kebutuhan	2 Layanan	14.033.804,46
25	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Produksi Perikanan Budidaya**	**Kab Badung**		**15.701.218.553,00**	**PAD**	**Sesuai Analisa kebutuhan**		**1.147.949.500,88**
25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudidaya ikan yang meningkat kelas kemampuannya	Kab Badung	63 Kelompok	578.361.437,00	PAD	Sesuai Analisa kebutuhan	63 Kelompok	308.287.356,08
25	04	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kab Badung	33 Kelompok	314.285.967,00	PAD	Sesuai Analisa kebutuhan	33 Kelompok	9.645.020,00
25	04	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	Kab Badung	29 Kelompok	4.945.103,00	PAD	Sesuai Analisa kebutuhan	29 Kelompok	19.417.898,26
25	04	2.02	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kab Badung	1 Kelompok	259 130.367,00	PAD	Sesuai Analisa kebutuhan	1 Kelompok	279.224.437,82
25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah bulan keterkelolanya pembudidayaan ikan	Kab Badung	12 Bulan	15.122.857.116,00	PAD	Sesuai Analisa kebutuhan	12 Bulan	839.662.144,80
25	04	2.04	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab Badung	2 Dokumen	99.365.498,00	PAD	Sesuai Analisa kebutuhan	2 Dokumen	128.502.000,00
25	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Paket Prasarana Perikanan Budidaya	Kab Badung	1 Paket	14.781.626.943,00	PAD	Sesuai Analisa kebutuhan	1 Paket	-
25	04	2,04	03	Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembuidayaan Ikan dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab Badung	9 Unit	174.000.795,00	PAD	Sesuai Analisa kebutuhan	9 Unit	324.298.150,00
25	04	2.04	04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya Dalam 1 (satu)	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah	Kab Badung	1 Dokumen	67.863.880,00	PAD	Sesuai Analisa kebutuhan	1 Dokumen	86.861.994,80

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
						Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif	Sumber dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(10)
				Daerah Kab/Kota	Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan							
25	04	2.04	07	Perencanaan dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah hasil pengkajian pemanfaatan air dan pembudidayaan ikan yang disusun tepat waktu	Kab Badung		-	PAD	Sesuai Analisa kebutuhan		300.000.000,00
25	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Jumlah Kawasan Sumberdaya Perikanan yang Tertata dan Lestari**	**Kab Badung**	1 Kawasan	**80.068.112,00**	**PAD**	**Sesuai Analisa kebutuhan**	1 Kawasan	**195.411.370,00**
25	05	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Perairan yang Diawasi Kegiatan Usahanya	Kab Badung	1 Kawasan	80.068.112,00	PAD	Sesuai Analisa kebutuhan	1 Kawasan	195.411.370,00
25	05	2.01	01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kab/Kota	Kab Badung	1 Dokumen	80.068.112	PAD		1 Dokumen	195411370,00
25	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Jumlah Produksi Pemasaran Hasil Perikanan**	**Kab Badung**		**608.005.634,00**	**PAD**	**Sesuai Analisa kebutuhan**		**378.664.055,24**
25	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan yang termanfaatkan	Kab Badung	1 Dokumen	100.431.674				-
25	06	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Kab Badung	1 Dokumen	100.431.674				-
25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah pengolah dan Pemasar yang meningkat kemampuannya tentang keterjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	Kab Badung	50 orang	135.735.231				-
25	06	2.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap	Kab Badung	20 Pelaku Usaha	135.735.231				-

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
						Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif	Sumber dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(10)
				Mikro dan Kecil	Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Resiko							
25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Bahan Baku yang tersedia dan Terserap untuk Industri Pengolahan Ikan	Kab Badung		371.838.729,00	PAD	Sesuai Analisa kebutuhan		378.664.055,24
25	06	2.03	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab Badung	19.436,89 ton	371.838.729,00	PAD	Sesuai Analisa kebutuhan	19.436,89 ton	149.137.333,13
25	06	2.03	02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Kab Badung	7 Pelaku Usaha	-	PAD	Sesuai Analisa kebutuhan	7 Pelaku Usaha	229.526.722,11

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Badung merupakan acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan-kegiatan di bidang perikanan dalam satu tahun anggaran. Rencana ini memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, indikator hasil/outcome yang diharapkan serta jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mewujudkan kegiatan tersebut

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Badung menjadi sangat penting artinya dalam menghadapi berbagai permasalahan-permasalahan pembangunan perikanan ataupun mencari terobosan-terobosan baru di bidang perikanan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab dan kepedulian pemerintah dalam mengakomodasi berbagai kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat nelayan, pembudidaya ikan maupun pengolah ikan dengan melibatkan partisipasi masyarakat di dalamnya.

Dengan disusunnya Rencana Kerja (Renja) ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan pada tahun-tahun berikutnya.

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BADUNG,

I NYOMAN SUARDANA, S.Sos., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19721010 199302 1 002

BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA